

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang merasakan dampak dari adanya pandemi Covid-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Kemunculan virus ini telah mengubah kehidupan sosial masyarakat secara global. Dengan masuknya Virus Corona di Indonesia menimbulkan berbagai dampak yang sangat besar bagi negara Indonesia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Namun, jika dilihat hingga saat ini, pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif di berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya pada sektor perekonomian. Peningkatan kasus Covid-19 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja dan pembiayaan negara.

Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 1-20 Mei 2020, menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, sebanyak 94,69% usaha mengalami penurunan kinerja. Pandemi Covid-19 menyebabkan profit usaha menurun secara signifikan yang diakibatkan karena biaya produksi tetap atau meningkat namun terdapat penurunan penjualan. Dampak pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah untuk melakukan upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Upaya pemerintah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia menempati posisi ke-16 diantara negara-negara G20 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US\$ 1,19 triliun (Sumber : Bank Dunia). Indonesia memiliki potensi perekonomian yang tinggi, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dimana dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.

Menurut UUD 1945 yang dikuatkan oleh TAP MPR No. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang pengelolaan dan pengembangan UMKM muncul karena terdapat suatu keadaan, dimana perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting atau sering disebut sebagai pemain utama didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan menentukan masa depan pembangunan yang terletak pada kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkembang secara mandiri.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.

Dalam siaran pers HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2022 menjelaskan bahwa peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan jumlah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Proporsi serapan tenaga kerja UMKM Indonesia paling besar di ASEAN, namun jika dilihat dari kinerjanya UMKM Indonesia masih kalah jauh dengan UMKM negara tetangga, seperti Myanmar yaitu sebesar 69,3%. UMKM telah terbukti memiliki pondasi yang kuat, dimana pada saat krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 hanya UMKM yang masih kokoh berdiri di tengah krisis yang terjadi pada saat itu. Menurut Data Badan Pusat Statistik, pasca krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998, jumlah UMKM tidak berkurang tetapi terjadi peningkatan, dimana mampu menyerap 85 juta hingga 114 juta tenaga kerja sampai tahun 2013.

Di Indonesia, jumlah UMKM telah mencapai 65 juta unit usaha, dimana kebanyakan dari pelaku UMKM tersebut masih memiliki masalah atau tantangan yaitu seperti dalam hal mengelola keuangan hingga tata kelola administrasinya sehingga pelaku UMKM mengalami kendala tidak dapat mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar. Kebanyakan pelaku UMKM hanya fokus terhadap penjualan barangnya dan hasil usaha yang mereka

dapatkan tanpa dilakukan pengelolaan yang baik yang biasanya akan dihabiskan untuk konsumsi pribadi dan keluarganya (Krisna & Nuratama, 2021). Hal ini menyebabkan pelaku UMKM tidak mencapai kinerja usaha yang maksimal, waktu yang kurang efektif, bahkan biaya serta tenaga yang dibutuhkan semakin besar. Pelaku UMKM juga memiliki permasalahan terkait dengan teknologi, dimana dalam menjalankan usahanya mereka masih menggunakan metode konvensional atau masih dilakukan secara tradisional dan belum menggunakan teknologi dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan, baik dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kinerja UMKM di Indonesia. Terdapat sebuah kunci dari berkembangnya suatu UMKM yaitu meng-*upgrade mindset* pelaku UMKM itu sendiri.

Kinerja UMKM dikatakan sebagai aset tidak berwujud yang dimiliki UMKM, dimana terdiri dari pengetahuan, keterampilan, bakat, teknologi, metode, prosedur, dan budaya organisasi yang digunakan suatu usaha dalam bersaing dengan usaha yang lain. Kinerja UMKM merupakan suatu hasil yang dicapai secara keseluruhan yang kemudian dilakukan perbandingan dengan target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan telah disepakati bersama pada UMKM tersebut. Kinerja UMKM dapat diukur secara kuantitas dan kualitas. Selain itu, kinerja UMKM juga dapat diukur melalui kinerja keuangan dan kinerja non keuangan.

Dalam penelitian ini, kinerja UMKM diukur melalui kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Adapun kinerja keuangan dapat diukur melalui laba atau keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan dan modal yang dimiliki oleh UMKM. Sedangkan, kinerja non keuangan dapat diukur melalui kegiatan

pengembangan sumber daya manusia yang meliputi tenaga kerja atau karyawan dan pemasaran produk yang dimiliki oleh UMKM terkait.

Pada saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, khususnya di Kabupaten Karangasem, terdapat banyak kendala terkait dengan kinerja dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Karangasem. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karangasem pada tahun 2018-2021 diketahui mengalami peningkatan yang sangat signifikan, namun pada tahun 2022 jumlah UMKM Kabupaten Karangasem mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1
Jumlah UMKM Provinsi Bali

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Karangasem	38.989	39.589	40.468	57.456	40.614
2.	Buleleng	31.563	34.552	34.374	54.489	57.216
3.	Jembrana	10.525	27.654	24.346	46.277	66.537
4.	Tabanan	38.980	41.459	42.744	43.715	47.160
5.	Badung	16.899	19.688	19.261	22.647	40.989
6.	Denpasar	30.840	31.826	32.026	32.224	32.226
7.	Gianyar	91.511	75.412	75.482	75.542	75.620
8.	Bangli	43.948	44.068	44.068	44.123	44.175
9.	Klungkung	9.712	11.761	14.548	35.792	36.072

Sumber : Data Keragaan UMKM Provinsi Bali

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Karangasem merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Bali yang mengalami penurunan jumlah UMKM pada tahun 2022. Pada tahun 2021, dapat diketahui bahwa jumlah UMKM Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan yang sangat drastis dan signifikan yang disebabkan karena pada saat terjadinya pandemi Covid-19, kebanyakan masyarakat Kabupaten Karangasem beralih profesi untuk membuka usaha sehingga pada tahun 2021 jumlah UMKM mencapai angka 57.456 UMKM. Namun, pada tahun 2022, jumlah UMKM mengalami penurunan sehingga jumlah UMKM yang terdata sampai saat ini berjumlah 40.614 UMKM.

Menurut Plt. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem, I Wayan Kertya menuturkan bahwa penurunan UMKM di Kabupaten Karangasem ini disebabkan karena pelaku UMKM Kabupaten Karangasem hanya berfokus pada kegiatan produksi tanpa memikirkan pengelolaan yang tepat, baik itu dari modal, pendapatan, pengeluaran, maupun pencatatan keuangan usahanya. Sehingga, hal ini mengakibatkan pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem mengalami penurunan *omzet* hingga mengalami kebangkrutan. Selain itu, ketika produk yang dihasilkan sudah selesai dan siap untuk dijual, mereka kesulitan dalam memasarkan produknya dan hanya mengandalkan pemasaran secara konvensional. Hal ini menyebabkan jumlah UMKM di Kabupaten Karangasem mengalami penurunan yang sangat drastis akibat dari permasalahan yang mereka hadapi sehingga pelaku UMKM mengalami kebangkrutan dan otomatis jumlah pelaku UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Karangasem akan berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut akan berpengaruh pada penurunan kinerja UMKM di Kabupaten Karangasem.

Kabupaten Karangasem memiliki beberapa jenis UMKM yang mampu menyokong perekonomian masyarakat Kabupaten Karangasem. Jenis UMKM tersebut antara lain seperti perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian, aneka jasa, dan lainnya. Namun, dari beberapa jenis UMKM tersebut, sektor perdagangan mengalami penurunan yang sangat mencolok pada tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 2
Jenis UMKM Kab. Karangasem

No.	Tahun	Jenis UMKM				Jumlah
		Perdagangan	Industri Pertanian	Industri Non Pertanian	Aneka Jasa	
1.	2018	13.149	20.573	2.096	3.136	38.989
2.	2019	13.695	20.574	2.096	3.186	39.589
3.	2020	14.388	20.628	2.164	3.288	40.468
4.	2021	47.220	2.787	3.133	4.316	57.456
5.	2022	24.236	-	14.783	1.595	40.614

Sumber : Data Keragaan UMKM Provinsi Bali

Berdasarkan data tersebut, sektor perdagangan merupakan salah satu jenis UMKM di Kabupaten Karangasem yang mengalami penurunan jumlah UMKM yang sangat drastis. Data di atas menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Karangasem didominasi oleh sektor perdagangan. Hal ini dapat diketahui dari

jumlah UMKM di Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 secara keseluruhan yaitu sejumlah 40.614 UMKM, sedangkan jumlah UMKM sektor perdagangan berjumlah 24.236 UMKM. Pelaku UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Karangasem sebagian besar mengalami kendala pada saat melakukan pemasaran produknya karena masih banyak pelaku UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Karangasem yang masih melakukan pemasaran secara konvensional dan belum menerapkan inovasi maupun penggunaan teknologi didalamnya. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi produk dan kualitas produk, bahkan dapat mempengaruhi daya saing UMKM di pasar. Mengetahui hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem terus bergerak maju dan menciptakan transformasi pasar digital melalui sebuah aplikasi yang bernama PEKENAN. Berdasarkan hal tersebut, variabel penggunaan aplikasi PEKENAN sangat sesuai dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Karangasem.

Pemasaran Karangasem Era Baru Prakerti Nadhi atau disebut PEKENAN merupakan sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran *online* bagi para pelaku UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Karangasem. Aplikasi ini resmi diluncurkan secara virtual di ruang KMC Kantor Bupati Karangasem pada tanggal 28 Oktober 2021 oleh Bupati Karangasem, I Gede Dana dan didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem, I Wayan Kertya. Peluncuran aplikasi ini diikuti oleh seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Karangasem. Aplikasi ini khusus dibuat untuk pelaku UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Karangasem, dimana terdapat proses transaksi antara pelaku UMKM dengan pelanggan yang dapat dilakukan melalui media sosial. Platform digital yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten

Karangasem ini menyediakan sarana pemasaran secara kekinian yang bertujuan agar dapat mewujudkan ekonomi Kabupaten Karangasem yang Pradnyan, Kertha, Santhi, dan Nadhi.

Menurut Bupati Karangasem, I Gede Dana, dalam aplikasi ini tidak sembarang produk dapat diposting karena pengguna aplikasi ini akan secara detail diverifikasi oleh administrator yang bertujuan agar pelaku UMKM menjadi lebih produktif dan selektif dalam menggunakan aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Karangasem. Menurut data yang tersedia pada aplikasi PEKENAN pada fitur Daftar Toko, jumlah UMKM Perdagangan yang menggunakan aplikasi ini sebagai media pemasarannya sejauh ini masih berada pada angka 179 UMKM. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah UMKM Perdagangan di Kabupaten Karangasem yang saat ini berjumlah 24.236 UMKM. Sejak diluncurkannya aplikasi PEKENAN ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem gencar untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem dengan harapan semakin banyak jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem yang menggunakan aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang bernama PEKENAN.

Dengan diluncurkannya aplikasi PEKENAN ini, diharapkan pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem dapat menuangkan berbagai ide dan inovasi berbasis ekonomi kreatif sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat membantu perekonomian, khususnya pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Karangasem. Melalui aplikasi PEKENAN yang langsung dinaungi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem ini dapat mengantisipasi adanya kerugian dari praktik-

praktik penipuan yang selama ini terjadi di media sosial dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja UMKM yang bergerak pada sektor perdagangan di Kabupaten Karangasem.

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Gubernur Bali, I Wayan Koster menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat, salah satunya yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Jumlah unit usaha penerima yaitu sebanyak 239.269 UMKM dengan bantuan sebesar Rp 1.200.000 dalam satu tahun 2021 dengan total anggaran sebanyak Rp 287 Miliar lebih. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang menduduki posisi ke-2 dari 9 Kabupaten di Bali yang mengusulkan Dana BPUM dan cair pada tahun 2021.

Kabupaten Karangasem menjadi salah satu daerah penerima BPUM yang sudah berjalan sejak tahun 2020. Penerima dana BPUM di Kabupaten Karangasem terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem, sebanyak 57.456 pelaku UMKM Kabupaten Karangasem telah diajukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2020, namun setelah diverifikasi hanya sebagian usulan yang lolos verifikasi dan mendapatkan BPUM pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem kurang memperhatikan bagaimana syarat dan mekanisme yang ditentukan.

Selain itu, masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem kurang mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan dana BPUM. Hal ini mengakibatkan masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem tidak mendapatkan Dana BPUM dan menjadi tidak tepat sasaran. Kemudian, pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem yang mendapatkan bantuan ini sebagian besar kesulitan pada saat mengelola dana ini. Pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem belum mengelola dana ini dengan baik dan benar, dimana masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem menggunakan dana BPUM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat untuk memiliki modal masih terbatas. Mengetahui masih banyak pelaku UMKM yang belum menerima bantuan ini, Bupati Karangasem I Gede Dana melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

I Wayan Kertya selaku Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem menjelaskan bahwa akhirnya pada tahun 2021, sebanyak 36.160 pelaku UMKM telah menerima Dana BPUM dengan rating tertinggi ke-2 setelah Kabupaten Gianyar dengan jumlah bantuan dana sebesar Rp 1.200.000. Dilihat dari data tersebut, realisasi penerima BPUM di Kabupaten Karangasem dikatakan tinggi berkat usaha yang dilakukan oleh Bupati Karangasem. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem kembali mengusulkan sebanyak 32.731 UMKM yang bertujuan agar pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem dapat merasakan bantuan dana BPUM ini.

I Wayan Kertya selaku Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem, menjelaskan pengusulan BPUM tahun 2021 dapat dilakukan melalui mendaftarkan usahanya melalui perbekel atau lurah setempat. Dengan

adanya bantuan BPUM ini diharapkan pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem dapat meningkatkan kinerja usahanya dan diharapkan memiliki dampak yang positif untuk keberlanjutan usahanya, khususnya pada UMKM Kabupaten Karangasem yang bergerak pada sektor perdagangan.

Pelaku UMKM yang bergerak pada sektor perdagangan diketahui mengalami penurunan yang sangat drastis yang disebabkan karena menghadapi permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan usahanya. Kebanyakan UMKM tersebut belum menerapkan pencatatan keuangan maupun penyusunan laporan keuangan dengan teknologi. Kurangnya pengelolaan dan pengetahuan akan teknologi menjadikan UMKM di Kabupaten Karangasem memiliki banyak kendala dalam menjalankan usahanya. Hal ini menjelaskan bahwa masih kurangnya pelatihan dan pendampingan terkait dengan pengelolaan keuangan usaha yang baik.

Menurut Krisna & Nuratama (2021), Pemerintah harus terus mendorong penerapan teknologi kepada pelaku UMKM. Salah satu yang penting adalah pencatatan keuangan dengan sistem berbasis Teknologi Informasi. Oleh karena itu terdapat suatu cara pemberdayaan masyarakat dengan mengajarkan dan mengimplementasikan penggunaan *Financial Technology* LAMIKRO agar masyarakat yang memiliki UMKM di Kabupaten Karangasem dapat mengelola keuangan usahanya dengan baik. Hingga saat ini pelaku UMKM yang menggunakan aplikasi LAMIKRO hanya sebanyak 23.000 UMKM dari seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Apabila dilihat dari jumlah UMKM dan pengguna LAMIKRO, jumlah pengguna LAMIKRO masih memiliki jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah UMKM di Indonesia.

Setelah melakukan penggalian informasi, ternyata kebanyakan pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem, khususnya yang bergerak pada sektor perdagangan terbatas akan pengetahuan akuntansi. Selain itu, LAMIKRO merupakan aplikasi yang sangat baru dan tidak diketahui oleh banyak pelaku UMKM, khususnya di Kabupaten Karangasem. Oleh karena itu, melalui Aplikasi LAMIKRO diharapkan akan membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan *skill* atau kemampuan pelaku UMKM, khususnya pada UMKM yang bergerak pada sektor perdagangan di Kabupaten Karangasem yang sudah maupun yang belum mengetahui bagaimana alur pencatatan transaksi keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi dilakukan secara digital hingga laporan keuangan terbentuk karena LAMIKRO memiliki berbagai fitur didalamnya. Aplikasi LAMIKRO diharapkan dapat membantu pelaku UMKM, khususnya pada UMKM di Kabupaten Karangasem untuk mempelajari teknologi terkait dengan bidang akuntansi. Melalui diterapkannya aplikasi ini diharapkan digitalisasi dapat segera bangkit, berkembang, dan terus maju untuk dapat mewujudkan target pemerintah agar 30 juta UMKM dapat masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024 mendatang.

Dalam penelitian ini terdapat hubungan atau keterkaitan antara variabel independen yang digunakan dengan variabel dependen. Adapun alasan dipilihnya 3 variabel independen yang terdiri dari penggunaan aplikasi PEKENAN, efektivitas dana BPUM, dan pemanfaatan *financial technology* LAMIKRO yaitu dikarenakan ketiga variabel ini dapat mempengaruhi kinerja UMKM yang terdiri dari kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Penggunaan aplikasi PEKENAN ini berkaitan dengan penjualan produk, dimana

dapat masuk ke dalam indikator Kinerja UMKM yaitu kinerja keuangan. Kemudian, pemasaran produk akan masuk ke dalam indikator Kinerja UMKM, yaitu kinerja non keuangan, serta dalam penggunaan aplikasi ini otomatis akan memberikan manfaat bagi sumber daya manusia (tenaga kerja). Efektivitas dana BPUM ini berkaitan dengan modal usaha, dimana dapat masuk ke dalam indikator kinerja keuangan. Kemudian pemanfaatan *financial technology* LAMIKRO ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan usaha yang terdiri dari laba usaha yang merupakan indikator dari Kinerja UMKM khususnya kinerja keuangan, serta berpengaruh terhadap sumber daya manusia (tenaga kerja) yang masuk ke dalam kinerja non keuangan.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Malini & Herawati (2021) yang meneliti mengenai Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana BPUM, Penggunaan *Software* Akuntansi, Dan *Human Capital* Terhadap Kinerja Usaha Mikro (Studi Pada Usaha Mikro Penerima Dana BPUM Di Kecamatan Buleleng). Adapun perbedaan maupun kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada penggunaan variabel independen atau variabel bebas. Pada penelitian terdahulu, peneliti menggunakan variabel efektivitas penggunaan dana BPUM, penggunaan *software* akuntansi, dan *human capital*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel penggunaan aplikasi PEKENAN, efektivitas dana BPUM, dan pemanfaatan *financial technology* LAMIKRO.

Variabel penggunaan aplikasi PEKENAN dan pemanfaatan *financial technology* LAMIKRO masih jarang digunakan oleh penelitian terdahulu dan dapat dikategorikan sebagai variabel yang masih sangat baru. Hal ini karena

aplikasi PEKENAN baru diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 dan *financial technology* LAMIKRO baru diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui Deputi Bidang Sumber Daya Manusia pada tahun 2017, dimana masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui lebih jauh manfaat dari menggunakan aplikasi PEKENAN maupun LAMIKRO. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan variabel penggunaan *software* akuntansi secara luas, sedangkan penelitian ini menggunakan salah satu dari *software* akuntansi yang bernama LAMIKRO.

Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Buleleng, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karangasem. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh fenomena yang terjadi di Kabupaten Karangasem, dimana terdapat peningkatan jumlah UMKM dari tahun 2018-2021. Namun, pada tahun 2022 jumlah UMKM Kabupaten Karangasem mengalami penurunan yang disebabkan karena terdapat banyak kendala dalam menjalankan usahanya.

Selain itu, Kabupaten Karangasem merupakan satu-satu Kabupaten di Bali yang mengalami penurunan jumlah UMKM. Kemudian, Kabupaten Karangasem diketahui menjadi salah satu daerah penerima BPUM yang sudah berjalan sejak tahun 2020 dan dana yang diusulkan tersebut dapat cair pada tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan terkait dengan hasil penelitian terdahulu dan hasil penelitian ini.

Berdasarkan beberapa fenomena yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penggunaan**

Aplikasi PEKENAN, Efektivitas Dana BPUM, Dan Pemanfaatan *Financial Technology* LAMIKRO Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Karangasem”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Sektor perekonomian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Karangasem mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.
- b. Menurut survei yang dilakukan oleh LIPI (2020) menjelaskan bahwa sebanyak 94,69% usaha mengalami penurunan kinerja.
- c. Pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem, khususnya yang bergerak pada sektor perdagangan sebagian besar mengalami kendala pada saat melakukan pemasaran produknya.
- d. Pelaku UMKM yang bergerak pada sektor perdagangan di Kabupaten Karangasem rata-rata belum mengetahui bahkan menggunakan aplikasi Pemasaran Karangasem Era Baru Prakerti Nadhi yang baru diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem yang bernama PEKENAN yang berfungsi sebagai media pemasaran secara *online*.
- e. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem sebanyak 57.456 pelaku UMKM Kabupaten Karangasem telah diajukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2020, namun setelah diverifikasi hanya sebagian usulan yang lolos verifikasi dan mendapatkan BPUM pada tahun 2020.

- f. Pelaku UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Karangasem kurang memperhatikan dan mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan Bantuan Produktif Usaha Mikro, baik syarat dan mekanisme yang ditentukan.
- g. Masih banyak pelaku UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Karangasem tidak mendapatkan Dana BPUM dan menjadi tidak tepat sasaran.
- h. Pelaku UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Karangasem belum dapat mengelola dana ini dengan baik dan benar, dimana masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem menggunakan dana BPUM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- i. Pelaku UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Karangasem masih melakukan pencatatan sederhana yang dilakukan secara manual, belum menyusun laporan keuangan dengan baik, bahkan belum menggunakan teknologi yaitu aplikasi yang bernama LAMIKRO yang dapat digunakan para pelaku UMKM melalui *smartphone*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat berbagai permasalahan yang timbul. Agar permasalahan yang diteliti dapat dipahami lebih mendalam, maka pada penelitian ini penulis akan berfokus pada empat variabel yaitu Penggunaan Aplikasi PEKENAN, Efektivitas Dana BPUM, Pemanfaatan *Financial Technology* LAMIKRO dan Kinerja UMKM. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Karangasem.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan aplikasi PEKENAN berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Karangasem?
2. Apakah efektivitas dana BPUM berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Karangasem?
3. Apakah pemanfaatan *financial technology* LAMIKRO berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Karangasem?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pengaruh penggunaan aplikasi PEKENAN terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Karangasem.
2. Untuk menganalisa pengaruh efektivitas dana BPUM terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Karangasem.
3. Untuk menganalisa pengaruh pemanfaatan *financial technology* LAMIKRO terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Karangasem.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Dalam sebuah penelitian, terdapat manfaat yang akan diperoleh, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis. Apabila penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan berbagai permasalahan yang

terdapat dalam penelitian ini dapat terjawab, maka penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya terkait dengan Pengaruh Penggunaan Aplikasi PEKENAN, Efektivitas Dana BPUM, Dan Pemanfaatan *Financial Technology* LAMIKRO Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Karangasem. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau sumber referensi dalam melaksanakan penelitian yang sama yakni mengenai Pengaruh Penggunaan Aplikasi PEKENAN, Efektivitas Dana BPUM, Dan Pemanfaatan *Financial Technology* LAMIKRO Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Karangasem.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis dan Mahasiswa

Adapun manfaat praktis bagi penulis dan mahasiswa melalui diadakannya penelitian ini yaitu agar penulis dan mahasiswa mengetahui fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan Pengaruh Penggunaan Aplikasi PEKENAN, Efektivitas Dana BPUM, Dan Pemanfaatan *Financial Technology* LAMIKRO Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Karangasem. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis dan mahasiswa diharapkan mampu untuk mengimplementasikan terkait dengan Pengaruh Penggunaan Aplikasi PEKENAN, Efektivitas Dana BPUM, Dan

Pemanfaatan *Financial Technology* LAMIKRO Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Karangasem.

2) Bagi Pemerintah

Adapun manfaat praktis dari dilaksanakannya penelitian ini bagi pemerintah yaitu pemerintah diharapkan mampu memahami dan memberikan dukungan melalui berbagai bantuan terkait dengan fenomena yang terjadi mengenai Pengaruh Penggunaan Aplikasi PEKENAN, Efektivitas Dana BPUM, Dan Pemanfaatan *Financial Technology* LAMIKRO Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Karangasem.

3) Bagi Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha

Manfaat praktis untuk Universitas Pendidikan Ganesha yaitu melalui penelitian ini, seluruh civitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha diharapkan mampu mengetahui bagaimana Pengaruh Penggunaan Aplikasi PEKENAN, Efektivitas Dana BPUM, Dan Pemanfaatan *Financial Technology* LAMIKRO Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Karangasem. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber referensi ke perpustakaan bagi para peneliti kedepannya.